

**PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA
PRIMER KOPERASI PEGAWAI UPN “VETERAN” YOGYAKARTA**

**Lidry Devi Yohsica Tanggulangan
Sutoyo**

Indra Kusumawardhani

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Yogyakarta

ABSTRACT

This research was conducted to understand the implementation of good governance on Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Cooperative is economic organization that based on sense of family. employee's Cooperative in the present society with the purpose to achieve the welfare of members and society with professionalism, quality and integrity. This type of research is a qualitative descriptive method. Instruments used in data collection are interviews, observations, documentations and questionnaires.

The result of the research represent passage of the good governance principles include of transparency in the provisioning information for supervisors, administrators, managers, employees, members in a transparent and opened, so that employees have already known how the system that are within the cooperative principle accountability. The principle of responsibility shown Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta towards employees by providing a range of benefits, health insurance, safety and social responsibility to the society. Then the principle of independency showed no intervention internally and externally. Finally, the Fairness principle, shareholders (members) receive fair and same treatment in the implementation of the RAT and the division SHU, employees were recruited based on their expertise, so the company does not discriminate towards employees based on racial and establish a fair system of reward and punishment. Good Governance in Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, has been realized and the Supervisor of Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta was instrumental in improving good governance of cooperative.

Keywords: Cooperative, Good Governance, Good Corporate Governance Principles.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam lingkungan pemerintahan dan dunia usaha terutama dalam dekade terakhir ini, berkembang istilah dan konsep *good governance* atau tata kelola yang baik. Istilah dan konsep tersebut berkembang terutama sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Krisis ekonomi tersebut membuka kesadaran semua pihak bahwa terjadi ketidakberesan dalam pengelolaan pemerintahan dan dunia usaha yang ditandai dengan maraknya praktik kolusi, korupsi, nepotisme, persaingan usaha secara curang, praktik monopoli, dan lain-lain, serta membuka mata seluruh elemen bangsa akan pentingnya pengelolaan pemerintahan dan dunia usaha secara baik (*good governance*).

Penyelenggaraan tata kelola yang tidak diselenggarakan dengan baik dapat menimbulkan lemahnya sistem pengendalian internal. Maka dari itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan baik pengawas, pengurus, manajer, dalam kualitas pelayanan kepada pemegang kepentingan (masyarakat) serta kesiapan dalam mengatasi dampak negatif eksternal dari peristiwa ekonomi, bencana alam, tragedi dan lain-lain. Terselenggaranya *good governance* yang sudah terkelola oleh sistem merupakan syarat utama terwujudnya keteraturan yang mendasarkan pada aturan mekanisme dan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh aturan eksternal (misalnya Undang-Undang) atau aturan internal. Prijambodo (2012) juga menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya organisasi menjadi lebih efisien, efektif dan mengurangi pemborosan, penyimpangan dan lain-lain. Pada akhirnya organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dan terjaga kesinambungan hidupnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketika orang mendengar sebutan “tata kelola yang baik”, atau “*good governance*”, muncul beberapa penafsiran. Pernyataan kata *governance*, seolah-olah dipersamakan dengan kepentingan kantor pemerintah. Terlebih lagi dalam aplikasinya berkembang sebagai konsep “tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*”. Penyebutan kata perusahaan atau *corporate* seolah-olah konsep ini hanya berlaku terbatas untuk lingkup perusahaan saja, pemahaman seperti ini tentu tidak tepat (Prijambodo, 2012).

Tata kelola yang baik (*good governance*) maupun tata kelola perusahaan yang baik atau (*good corporate governance/GCG*), sebenarnya merupakan konsep dan instrumen umum sebagai langkah pembaharuan dalam sistem organisasi. Setiap organisasi seperti perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD), perusahaan milik swasta, koperasi, organisasi seperti kantor pemerintah, lembaga atau yayasan nirlaba, dan organisasi lain wajib dikelola dengan baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang baik antara *shareholders* dan *stakeholders* lainnya, sehingga organisasi dapat dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik (Andayani, 2001).

Organisasi yang menerapkan tata kelola yang baik misal koperasi, dituntut siap melakukan perubahan dan membenahan diri, dari kondisi “belum” berubah menjadi “sudah” memenuhi kriteria dan persyaratan tata kelola yang baik (*good governance*). Dengan demikian tata kelola yang baik atau *good governance*, berlaku untuk semua organisasi (*universal*), baik perusahaan swasta, perusahaan negara, koperasi, organisasi-organisasi sosial, yayasan, kantor pemerintahan (Prijambodo, 2012).

Sebagai amanat konstitusi untuk membangun demokrasi ekonomi, sosial, dan budaya koperasi diberi porsi perhatian lebih besar agar bisa meningkatkan peran sertanya

secara signifikan khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah, kelak bukan cuma memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menciptakan pemerataan ekonomi serta memberdayakan masyarakat (Nasution, 2008).

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat semakin lama semakin menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut diperkuat oleh data Laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dimana pertumbuhan koperasi naik 16,2% dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2010 jumlah koperasi tercatat sebanyak 177.482 unit, sementara hingga bulan Juni 2014 jumlah koperasi meningkat menjadi 206.288 unit. Demikian pula jumlah anggota koperasi pada tahun 2010 tercatat 30.461.121 orang, lalu meningkat menjadi 35.237.990 orang hingga bulan Juni 2014 atau naik 15,7%.

Secara kuantitas koperasi tumbuh cukup pesat namun kuantitas pertumbuhannya inilah yang masih menjadi perdebatan. Dengan pertumbuhan koperasi yang meningkat di Indonesia, bukan berarti koperasi di Indonesia juga mengalami perkembangan secara kualitas. Contoh beberapa koperasi di Indonesia yang mengalami kebangkrutan, diantaranya Koperasi Simpan-Pinjam Anugrah Buana Artha dan Koperasi Sumber Artha Mandiri dua koperasi ini berada di Solo, mengalami kebangkrutan karena terjadi “gagal pengelolaan” seperti yang dilansir dalam website berita tempointeraktif.com. Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur yang pernah mengalami kebangkrutan dengan utang deposito 4500an anggotanya yang mundur dan panik, 5 unit usahanya tutup dengan kerugian 450 juta serta pernah jadi daftar hitam BI. Lalu Koperasi Putera Pandawa yang mengalami kebangkrutan terkait masalah penipuan. 1300 nasabah menuntut uang tabungannya dikembalikan.

Menurut Merza (2006) dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh - sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar terutama Pemerintah, masih sangat besar. Berbeda dengan Negara Maju yang sering dikatakan sebagai ekonomi-ekonomi yang kapitalis yang tidak cocok bagi pengembangan koperasi ternyata justru mengalami perkembangan yang cukup baik, hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari penyelenggaraan tata kelola yang baik (*good governance*) pada koperasi di Negara Maju sehingga membuat koperasi di Negara Maju menjadi lebih berkembang dan dapat berkontribusi untuk masyarakat maupun negaranya.

Penyelenggaraan tata kelola yang baik pada koperasi merupakan isu yang paling hangat dan gencar disosialisasikan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal ini dikarenakan tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks di era globalisasi. Hal ini juga diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah dan akuntabel.

Effendi (2009) mengemukakan bahwa dalam jangka panjang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik mempunyai hubungan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan tujuan atas penerapan GCG adalah terciptanya kinerja yang tinggi serta citra perusahaan yang harum. Kinerja perusahaan itu sendiri harus memiliki ukuran tingkat keberhasilan yang utamanya tercermin dalam indikator kinerja kunci perusahaan. Sedangkan menurut Kusumaningtyas

(2009), bahwa penerapan GCG sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian manajerial yang tepat akan baik untuk perusahaan publik maupun swasta, serta diharapkan memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Sementara hasil penelitian Agam (2012) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan prinsip GCG dengan baik perlu adanya kesiapan penerapan GCG. Dalam menjalankan industri bisnis, diperlukan pengelolaan yang sehat agar mendapatkan kepercayaan *shareholders*. Analisis kesiapan yang dilakukan dapat ditinjau dari pemenuhan aspek infrastruktur dan soft-struktur GCG yang dimiliki.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penerapan tata kelola yang baik diterapkan pada perusahaan berbadan hukum perseroan. Penelitian tentang tata kelola yang baik dengan objek koperasi masih jarang dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UPN “Veteran” Yogyakarta. Hal ini menjadi celah bagi penulis untuk melakukan pengembangan penelitian terdahulu dengan harapan dapat mengungkapkan informasi baru. Implementasi *good governance* pada koperasi akan membawa dampak yang baik tidak hanya kepada koperasi sebagai badan hukum, tetapi khususnya juga kepada anggota sebagai *shareholders*. Sebagai inovasi di bidang organisasi dan manajemen, yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi organisasi, sudah sepatutnya koperasi menerapkan tata kelola yang baik (*good governance cooperative*). *Good governance cooperative* ini merupakan langkah re-design organisasi menuju organisasi yang sehat, transparan, akuntabel, mandiri, bertanggung jawab dan wajar dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan karakteristik masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2012).

Penelitian ini dilakukan di Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Unit usaha yang dijalankan oleh Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta adalah simpan pinjam, niaga, dan jasa. Penelitian jenis deskriptif dipilih karena peneliti bermaksud untuk mencari jawaban tentang penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Dimana data kuantitatif berupa data yang belum diolah hasil dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh seluruh anggota populasi yaitu para anggota karyawan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Sedangkan data kualitatif berupa hasil wawancara dengan pengurus Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Perkoperasian, pedoman GCG, visi, misi, buku arahan pengawas dan struktur uraian tugas baik pengawas, pengurus, manajer, serta anggota karyawan Primer Koperasi Pegawai

UPN “Veteran” Yogyakarta. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengawas, pengurus, dan karyawan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah ketua pengawas, ketua pengurus dan karyawan inti Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Karyawan inti yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja dalam Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2003), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Display Data
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Variabel Penelitian

1. Penerapan tata kelola yang baik (*Good Governance*)

Dalam hal ini, penulis akan menguji keefektifan penerapan tata kelola yang baik (*Good Governance*) di Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau sebaliknya. Keefektifan penerapan tata kelola yang baik ini diukur dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas
- b. Kewajaran
- c. Transparansi
- d. Pertanggungjawaban
- e. Kemandirian

2. Peran pengawas dalam meningkatkan tata kelola yang baik (*Good Governance*)

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis mengenai peran pengawas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai bagian dari struktur organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan *good governance*. Adapun indikator-indikator yang diukur adalah sebagai berikut:

- a. *Compliance*
- b. *Conformance*
- c. *Performance*

Tabel 1
Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Instrumen
Perwujudan <i>Good Governance</i>	1. <i>Transparancy</i> 2. <i>Accountability</i> 3. <i>Responsibility</i> 4. <i>Independency</i> 5. <i>Fairness</i>	Ordinal	Kuesioner
Peran pengawas dalam meningkatkan <i>Good Governance</i>	1. <i>Compliance</i> 2. <i>Conformance</i> 3. <i>Performance</i>	Ordinal	Kuesioner

Pengukuran terhadap kedua variabel tersebut, dilaksanakan dengan membandingkan antara kondisi yang sebenarnya dalam koperasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Data hasil penelitian yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis oleh penulis untuk mengetahui penerapan *good governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, dikumpulkan melalui penelitian atas hasil kuesioner dengan menggunakan perhitungan persentase.

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion (1990), yaitu dengan menjumlahkan jumlah jawaban “YA” kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jawaban "YA"}}{\text{Jumlah Kuesioner} \times \text{Jumlah Pertanyaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jawaban YA : Seluruh penjumlahan jawaban YA yang dijawab oleh responden dalam kuesioner.
- Jumlah Kuesioner : Seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar yang wajib diisi oleh para responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
- Jumlah Pertanyaan : Pertanyaan yang ada dalam kuesioner berdasarkan klasifikasinya masing-masing.

Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisis, dapat diklasifikasikan secara umum, yaitu:

1. Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “Perwujudan *Good Governance* Koperasi” adalah sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0%-25%	<i>Good Governance</i> Tidak Terwujud
26%-50%	<i>Good Governance</i> Kurang Terwujud
51%-75%	<i>Good Governance</i> Cukup Terwujud
76%-100%	<i>Good Governance</i> Sangat Terwujud

Sumber: Tadikapury (2011)

2. Kriteria penilaian dari hasil kuesioner yang berkaitan dengan “Peran Pengawas dalam Meningkatkan *Good Governance* Koperasi” adalah sebagai berikut:

Persentase	Kriteria
0%-25%	Peran Pengawas Tidak Berperan Dalam Meningkatkan <i>Good Governance</i> Koperasi
26%-50%	Peran Pengawas Kurang Berperan Dalam Meningkatkan <i>Good Governance</i> Koperasi
51%-75%	Peran Pengawas Cukup Berperan Dalam Meningkatkan <i>Good Governance</i> Koperasi
76%-100%	Peran Pengawas Sangat Berperan Dalam Meningkatkan <i>Good Governance</i> Koperasi

Sumber: Tadikapury (2011)

3. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. WAWANCARA

Pelaksanaan tata kelola yang baik (*Good Governance*) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

Dalam melaksanakan *Good Governance* dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kepuasan pelayanan kepada anggota dan pihak yang berkepentingan lainnya, terciptanya efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang juga menghantarkan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta menerapkan prinsip *good governance*. Penjabaran dari prinsip-prinsip yang telah dilakukan di dalam koperasi antara lain:

1. Transparansi (*Transparency*)

Sumber informasi yang ada dalam koperasi sangat fleksibel. Sebagian besar didapatkan dari atasan, namun tidak menutup kemungkinan ada informasi yang berasal dari bawahan dan dapat langsung disampaikan ke bagian/unit masing-masing. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan transparansi pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta seperti yang diungkapkan oleh ketua pengurus, Bapak Yuni Istanto:

“Transparansi dalam koperasi ini dilakukan melalui koordinasi yang intens diantara semua perangkat dan aparat koperasi mulai dari pengurus, pengawas, manajer, karyawan, dan juga anggota koperasi. Forum komunikasi ini kita sediakan secara tertulis dan juga penyampaian lisan yaitu dengan pertemuan antara pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota koperasi. Koperasi sebisa mungkin memberikan informasi yang akurat untuk anggota koperasi. Jika para anggota memiliki permasalahan, koperasi selalu mencoba melayani para anggota koperasi dengan mendengarkan dan mencari solusi secepat mungkin untuk permasalahan tersebut, begitu juga sebaliknya koperasi selalu bersikap transparan kepada para anggotanya sehingga tidak ada permasalahan yang kesannya disembunyikan baik dari pihak koperasi maupun anggota koperasi. Hal ini bertujuan agar seluruh anggota koperasi dapat memahami situasi dan perkembangan yang ada pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dengan demikian diharapkan bersama-sama bisa memajukan koperasi menjadi lebih baik.”

Koordinasi yang intens diantara semua perangkat dan aparat merupakan perangkat penting dalam suatu penyampaian informasi yang berkaitan. Prinsip transparansi dalam Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta juga diterapkan dalam hal pengambilan keputusan dimana dalam pengambilan keputusan harus ada koordinasi yang intens diantara semua perangkat dan aparat koperasi, agar dalam pengambilan keputusan tidak ada yang merasa dirugikan. Pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama dalam RAT, dimana dalam RAT semua aparat koperasi berkumpul untuk membahas segala kegiatan koperasi dalam setahun, setiap kegiatan koperasi akan dipertanggungjawabkan dalam RAT, seperti yang diungkapkan Bapak Yuni Istanto selaku ketua pengurus:

“pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja melainkan harus dilakukan bersama- sama yaitu dengan pengawas, manajer dan juga anggota koperasi terlebih lagi hal-hal yang bersifat material, pasti akan dibicarakan dengan seluruh aparat koperasi. Koperasi memiliki ciri-ciri khusus yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, maka koperasi sebisa mungkin melibatkan anggota koperasi dalam setiap kegiatan koperasi, contohnya seperti melibatkan anggota koperasi dalam RAT, dimana dalam RAT ini seluruh anggota koperasi baik itu pengurus, pengawas, manajer, karyawan hingga anggota koperasi bebas menyampaikan pendapatnya dalam RAT.”

Tujuan diadakannya RAT ini adalah agar seluruh anggota koperasi dapat memahami situasi dan perkembangan yang ada pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dimana dalam RAT ini setiap program kerja, laporan hasil kegiatan koperasi, permasalahan-permasalahan koperasi, berbagai aspirasi-aspirasi anggota koperasi dan berbagai hal-hal yang bersifat material dibahas dan dibicarakan secara mendalam hingga ditemukan titik dimana semua menyepakati hasilnya. Dengan demikian bersama-sama diharapkan dapat memajukan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi koperasi lebih baik dan mampu mensejahterakan anggotanya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta secara transparan dan wajar mengelola berdasarkan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) yang diputuskan bersama melalui rapat anggota. Untuk penyajian laporan kegiatan hasil usaha dan keuangan secara rutin pada akhir tahun dilaksanakan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Hal ini juga disampaikan oleh ketua pengurus koperasi Bapak Yuni Istanto:

“Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertulis secara rinci bagaimana visi misi sampai dengan tugas di antara masing-masing lini manajemen mulai dari pengurus, pengawas, manajer, karyawan dan anggota dimana semuanya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Semuanya tercatat dengan detail dan semuanya dipahami oleh anggota.”

Tugas dan wewenang pengurus, pengawas, dan unit-unit kerja semuanya masuk di dalam struktur organisasi yang telah diterjemahkan dari AD/ART, dimana setiap kegiatan pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan akan dipertanggungjawabkan dalam RAT. Dalam unit kerja Bapak Yuni Istanto selaku ketua pengurus menyatakan:

“Setiap elemen koperasi memiliki job deskripsinya masing-masing dimana dalam job deskripsi juga terkait hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang, tanggung jawab dan juga sanksi. Hal ini sangat diperhatikan oleh semua lini yang bekerja di koperasi. Karena kinerja para pegawai koperasi menentukan bagaimana kualitas pelayanan kepada anggota yang setiap saat selalu dipantau dan dilaporkan oleh anggota kepada pengurus. Oleh sebab itu, kinerja para pegawai selalu dipantau dan dievaluasi bersama.”

Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta telah memiliki struktur organisasi beserta job deskripsi dengan jelas, kegiatan para pegawai koperasi selalu dipantau dan dievaluasi mingguan atau bulanan tergantung perubahan usaha. Jika terjadi kesalahan dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, maka akan diperingatkan sebelum terjadi kesalahan yang lebih fatal. Bentuk pertanggungjawaban para pegawai koperasi akan dilaporkan pada RAT bagaimana pencapaian yang telah dicapai selama periode tertentu.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Tanggung jawab Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta kepada seluruh jajaran bidang manajemen atau di tingkat karyawan dan juga kewajiban-kewajiban kelembagaan kepada pihak terkait. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengurus:

“Koperasi sudah bekerja sama dengan pihak kompeten dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan, seperti jaminan kesehatan dan keselamatan karyawan bekerja sama dengan jamsostek dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), pelaporan pajak secara rutin dan juga mengenai standar pengajian memenuhi peraturan yang ada di dalam Surat Keputusan Nomor: Kep/08/Primkop/VI/2013.”

Koperasi berprinsip memberikan kenyamanan lingkungan dengan ikut menjaga lingkungan sekitar koperasi. Keberadaan koperasi diharapkan dapat mempermudah kehidupan warga sekitar dengan menyediakan kebutuhan warga. Dalam hal tanggung jawab sosial koperasi selalu berusaha membantu memberikan apa yang bisa diberikan kepada warga yang mengalami musibah. Koperasi juga membantu beberapa daerah yang mengalami musibah, koperasi memiliki program anggaran kegiatan sosial untuk membantu warga yang membutuhkan. Selain itu koperasi selalu mengikuti perkembangan karir karyawan, semakin baik kinerja karyawan maka koperasi akan memberikan *reward*

atau apresiasi untuk karyawan yang berprestasi. Semua disesuaikan berdasarkan fokus kerja dan komposisi jabatan karyawan dan juga pendidikan karyawan.

Bentuk pertanggungjawaban lainnya yaitu Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang disampaikan setiap tahun, merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai bagian dari evaluasi bersama di kelompok- kelompok, untuk menjadi bahan penilaian oleh pengurus dalam memperbaiki kinerja koperasi di tahun berikutnya. Hal ini merupakan kewajiban dan cermin *good governance* koperasi kepada anggotanya yang berkesinambungan dengan terwujudnya transparansi oleh Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta yang dapat diketahui oleh berbagai pihak terutama sebagai perumusan kebijakan dari pengurus koperasi.

4. Kemandirian (*Independency*)

Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dalam pengelolaannya dilaksanakan secara profesional sesuai dengan porsi tugas yang diberikan oleh masing-masing perangkat koperasi dan mengacu pada Undang-Undang terkait. Kemandirian menurut Bapak Yuni Istanto selaku ketua pengurus sebagai berikut:

“dalam setiap bidang usaha koperasi berusaha untuk mandiri, secara bertahap diusahakan untuk mandiri. Tetapi terkadang kebutuhan operasional belum bisa terpenuhi dengan dana dari para anggota koperasi saja, maka dari itu koperasi menjalin kerjasama dengan pihak ketiga baik itu perbankan dan unit usaha-usaha yang lain untuk bisa bermitra dengan koperasi.”

Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta tidak merasa diintervensi oleh pihak manapun tetapi sebaliknya, Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta memperbesar rekanan dengan apresiasi seperti dengan instansi pemerintah dan juga rekanan perbankan terkait maupun juga dengan lembaga usaha yang lain. Sehingga kerjasama diantara rekanan ini akan semakin mengenalkan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dan juga semakin memberikan akses keluasaan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta kepada instansi pemerintah dan juga kepada pihak lainnya. Secara signifikan pengaruh internal maupun eksternal terkait dengan peraturan perundang-undangan belum begitu dirasakan oleh Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta bergerak secara otonom dimana Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dapat melakukan apa saja sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan namun selalu diikuti dengan tanggungjawab. Hal ini disampaikan oleh ketua pengurus yaitu Bapak Yuni Istanto:

“koperasi melakukan kegiatannya sesuai dengan program kerja yang telah disusun dengan matang dalam RAT setiap tahunnya, program kerja tersebut dapat diturunkan menjadi program jangka panjang. Setelah ditentukan program apa saja yang akan dilaksanakan maka koperasi mempunyai cukup gambaran bagaimana koperasi ini akan berjalan dalam 5 tahun kedepan, sehingga pada selanjutnya koperasi sudah berjalan berdasarkan agenda yang telah disesuaikan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.”

program kerja Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah disusun tersebut berdasarkan kepada evaluasi tahun-tahun sebelumnya agar pada tahun-tahun berikutnya dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip kewajaran diatur dan selalu mengacu pada AD dan ART dimana AD dan ART disusun berdasarkan hak dan kewajiban seluruh anggota koperasi baik pengurus, pengawas, manajer, karyawan, hingga anggota koperasi. Dalam mewujudkan kewajaran sebagai salah satu prinsip *good governance* pada pegawai koperasi, saran dan kritik selalu ditampung dan didiskusikan bersama, seperti yang disampaikan oleh ketua pengurus:

“mengingat bahwa anggota juga merupakan pemilik koperasi maka apapun yang disampaikan oleh para anggota baik itu kritik maupun saran harus ditampung dan ditanggapi sesegera mungkin agar tidak berlarut-larut dan menjadi permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Selain itu koperasi juga memiliki agenda khusus yaitu dimana forum komunikasi antara pengurus, pengawas, manajer dan karyawan bertemu dalam rangka meningkatkan produktivitas, memacu motivasi kinerja agar seluruh tim menjadi lebih baik dalam bekerjasama dan berkoordinasi.”

Demi terlaksananya *good governance*, tidak hanya kewajaran dalam penyampaian aspirasi baik anggota maupun karyawan, namun koperasi mampu beraktivitas dalam jangka panjang, memberi manfaat kepada anggota sebagai *shareholders* berupa pelayanan dan bagian SHU, seperti yang disampaikan ketua pengurus:

“sisa hasil usaha diberikan kepada seluruh anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha tersebut dibagikan berdasarkan pada porsi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi.”

Hal tersebut membuktikan bahwa Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dalam pembagian SHU sesuai dengan porsinya, selain itu koperasi juga memberi pelayanan yang baik karena pelayanan merupakan faktor yang sangat diperhitungkan. Pelayanan yang memuaskan juga mempersyaratkan terbentuknya pola hubungan antar organ di dalam koperasi, antara pengurus, pengawas, anggota dan organ-organ lain sehingga terlaksana tugas dan fungsi yang jelas serta optimal. Dilihat dari sisi kewajaran dalam perekrutan karyawan, koperasi memberikan kesempatan yang sama untuk semua kandidat. Seperti yang diungkapkan ketua pengurus:

“pada dasarnya Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan dan job deskripsi koperasi tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Namun terkadang ada beberapa pihak yang memberikan referensi, hal tersebut juga akan dipertimbangkan oleh koperasi, tapi bukan berarti bahwa kandidat dari luar akan dipandang sebelah mata. Dalam perekrutan karyawan baru koperasi akan melakukan tes, seleksi, wawancara dan sebagainya sampai mendapatkan kandidat yang sesuai.”

Sistem perekrutan melalui tes seleksi dan wawancara dengan pengurus dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik dengan kandidat karyawan baru dan menjamin kualitas SDM, selain itu koperasi juga menggunakan media website, hal ini mengindikasikan bahwa koperasi terbuka pada tenaga kerja diluar mitra koperasi. Sedangkan untuk penerimaan sebagai anggota baru koperasi, ketua pengurus menyampaikan:

“Syarat untuk menjadi anggota koperasi yang pertama bersedia memenuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan segala peraturan yang berlaku di Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, menyatakan kesanggupan melunasi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan sebagainya, lalu anggota juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menjadi anggota yang disebut dengan sosialisasi ini dimaksudkan agar anggota paham apa saja yang

menjadi hak dan kewajiban menjadi anggota. Mudah saja untuk menjadi anggota koperasi karena tidak ada yang dipersulit.”

Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta mengacu pada bhineka tunggal ika, artinya baik mulai dari unsur pengurus, pengawas, manajer, karyawan, dan anggota penerimaannya tidak dibedakan latar belakang, budaya, agama, maupun warna kulit dan lain sebagainya. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta adalah sebuah organisasi gerakan yang anggotanya memiliki berbagai latar belakang mulai dari pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, warga sekitar koperasi, pegawai swasta atau pegawai pemerintah maupun seorang pendidik, seorang pengusaha, bahkan mahasiswa semuanya diterima dengan baik karena fokus Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga dapat memberikan kontribusi yang positif secara ekonomi kepada para anggota koperasi.

Pemberian *reward* juga diberikan oleh Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta kepada anggota dan karyawan. Kriteria pemberian *reward* ini sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh karyawan serta anggota. Dengan begitu maka setiap karyawan dan anggota bisa adil mendapatkan *reward* sesuai dengan prestasi kerjanya. *Reward* berupa insentif ini merupakan kunci agar karyawan bisa termotivasi untuk bekerja, semakin besar kontribusinya maka *reward* yang diberikan semakin besar. Sistem *punishment* ada bermacam-macam seperti SP (Surat Peringatan), bisa juga pemotongan insentif, mutasi, dan bisa juga dipecat. Dengan adanya *punishment* ini diharapkan para karyawan tidak berbuat pelanggaran yang merugikan koperasi.

Dari kedua sisi tersebut, baik *shareholders* dan *stakeholders*, sudah terlihat Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip *fairness* dengan baik. Terlihat bagaimana setiap pemegang saham diperlakukan secara adil sesuai dengan haknya, dan setiap pemegang saham berhak mendapatkan informasi secara transparan, hal ini sesuai dengan prinsip kesetaraan. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta berusaha untuk merekrut karyawan yang benar-benar memiliki keahlian tanpa memandang suku, agama, maupun rasnya. Dan juga jika karyawan serta anggota berprestasi pasti akan mendapatkan *reward*, jika melakukan pelanggaran akan mendapatkan *punishment*.

B. KUESIONER

Dalam penelitian ini, peneliti juga menyebarkan kuesioner untuk para karyawan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Jawaban kuesioner digunakan untuk lebih memahami dan melengkapi hasil wawancara yang peneliti lakukan di Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Kuesioner yang peneliti sebar sebanyak 20 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 14 kuesioner, kuesioner yang kosong sebanyak 1 kuesioner dan 1 kuesioner yang diisi tidak lengkap, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 6 kuesioner. Berikut adalah hasil perhitungan kuesioner menggunakan rumus Dean J. Champion (1990):

1. Penilaian yang Berkaitan dengan Perwujudan *Good Governance* Koperasi
a. Transparansi (*Transparency*)

Tabel 4.1
Perhitungan persentase terhadap transparansi berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	10	2	-	12
2	10	2	-	12
3	9	1	2	12
4	10	2	-	12
5	10	1	1	12
Jumlah	49	8	3	60

$$\% \text{ Transparansi} = \frac{49}{60} \times 100 = 81,7\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 81,7%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip transparansi pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud.

Wujud nyata prinsip transparansi yang dilakukan oleh Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta adalah Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta telah bersikap terbuka dan transparan terhadap anggota koperasi. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota koperasi untuk dapat berperan serta dalam proses penyusunan peraturan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan di koperasi, serta dilakukan secara riil dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan anggota koperasi. Prinsip transparansi juga menyangkut tentang: (1) keterbukaan dalam hal rapat-rapat, (2) Keterbukaan informasi, (3) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tabel 4.2
Perhitungan persentase terhadap akuntabilitas berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	11	1	-	12
2	11	-	1	12
3	10	2	-	12
4	10	2	-	12
Jumlah	42	5	1	48

$$\% \text{ Akuntabilitas} = \frac{42}{48} \times 100 = 87,5\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 87,5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud.

Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, prinsip akuntabilitas ini memuat kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pengawas, pengurus hingga manajer beserta kewajiban- kewajibannya kepada anggota koperasi. Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan organisasi dan usaha koperasi serta bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam rapat anggota. Manajer Bidang Usaha bertanggungjawab atas kinerja para karyawan serta pelayanan usaha kepada anggota. Setiap pertanggungjawaban yang diberikan kepada pengawas, pengurus hingga manajer semua didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dimana dalam AD dan ART sudah tertera dengan jelas job deskripsinya masing-masing terkait dengan hal-hal yang menyangkut tugas, wewenang, tanggung jawab dan juga sanksi ini dilakukan agar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tabel 4.3
Perhitungan persentase terhadap pertanggungjawaban berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	9	3	-	12
2	10	2	-	12
3	10	2	-	12
4	9	2	1	12
Jumlah	38	9	1	48

$$\% \text{ Pertanggungjawaban} = \frac{38}{48} \times 100 = 79,2\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 79,2%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pertanggungjawaban pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud.

Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta prinsip pertanggungjawaban ini menuntut koperasi maupun pengawas, pengurus dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggungjawab. Selain itu Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta melakukan tanggungjawabnya kepada para karyawan dengan memberikan jaminan kesehatan, keselamatan kerja hingga insentif untuk para karyawan yang berprestasi. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta juga memberikan pelayan untuk lingkungan sekitar dengan menyediakan kebutuhan warga sekitar, membantu daerah yang mengalami musibah, dan membuat program anggaran kegiatan sosial.

d. Kemandirian (*Independency*)

Tabel 4.4
Perhitungan persentase terhadap kemandirian berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	7	5	-	12
2	9	3	-	12
Jumlah	16	8	-	24

$$\% \text{ Kemandirian} = \frac{16}{24} \times 100 = 66,7\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 66,7%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kemandirian pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta cukup terwujud.

Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, prinsip kemandirian ini menuntut para pengelola koperasi agar dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional koperasi yang berlaku. Koperasi mempunyai cukup gambaran bagaimana koperasi akan berjalan dalam 5 tahun kedepan, sehingga pada selanjutnya koperasi sudah berjalan berdasarkan agenda yang telah disesuaikan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kerjasama ini diharapkan dapat semakin mengenalkan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dan juga memberikan akses keluasaan Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta kepada instansi pemerintah dan juga pihak lainnya.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Tabel 4.5
Perhitungan persentase terhadap kewajaran berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	9	2	1	12
2	11	1	-	12
3	11	1	-	12
4	10	1	1	12
Jumlah	41	5	2	48

$$\% \text{ Kewajaran} = \frac{41}{48} \times 100 = 85,4\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 85,4%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kewajaran pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud.

Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta prinsip kewajaran menuntut seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari koperasi seperti contohnya selalu menampung dan mendiskusikan saran maupun kritik yang disampaikan anggota koperasi, pembagian SHU yang dilakukan dan disesuaikan dengan porsinya masing-masing jadi tidak ada yang akan merasa dirugikan. Selain itu perekrutan karyawan serta penerimaan anggota baru disesuaikan dengan syarat dan peraturan yang berlaku tanpa memandang suku, ras, maupun agama.

2. Penilaian yang Berkaitan dengan Peran Pengawas dalam Meningkatkan *Good Governance* Koperasi

a. Sebagai Kepatuhan (*Compliance*) *Good Governance*

Tabel 4.6
Perhitungan persentase terhadap *compliance Good Governance* berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	12	-	-	12
2	9	3	-	12
3	9	3	-	12
4	8	3	1	12
Jumlah	38	9	1	48

$$\% \text{ Compliance} = \frac{38}{48} \times 100 = 79,2\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 79,2%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawas sebagai *compliance Good Governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat berperan dalam meningkatkan *Good Governance*.

Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta kepatuhan *good governance* dilakukan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan kegiatan dan realisasi Program Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan Primkop Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta yang meliputi laporan bidang Organisasi, Usaha, dan Keuangan. Laporan pertanggungjawaban ini disusun sesuai dengan ketentuan AD dan ART, Undang-Undang Perkoperasian, serta Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan Primkop Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

b. Sebagai Kelengkapan/Kesesuaian (*Conformance*) *Good Governance*

Tabel 4.7
Perhitungan persentase terhadap *conformance Good Governance*
berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	8	4	-	12
2	8	4	-	12
3	8	4	-	12
Jumlah	24	12	-	36

$$\% \text{ Conformance} = \frac{24}{36} \times 100 = 66,7\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 66,7%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawas sebagai *conformance Good Governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta cukup berperan dalam meningkatkan *Good Governance*.

Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, kesesuaian/kelengkapan yang dilaksanakan dengan penerapan setiap prinsip-prinsip *good governance*, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memberikan masukan maupun rekomendasi tentang penyempurnaan sistem pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

c. Sebagai Unjuk Kerja (*Performance*) *Good Governance*

Tabel 4.8
Perhitungan persentase terhadap *performance Good Governance*
berdasarkan hasil jawaban kuesioner

Pertanyaan	Jawaban Ya	Jawaban Ragu-ragu	Jawaban Tidak	Total
1	8	4	-	12
2	8	4	-	12
Jumlah	16	8	-	24

$$\% \text{ Performance} = \frac{16}{24} \times 100 = 66,7\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan sama dengan 66,7%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawas sebagai *performance Good Governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta cukup berperan dalam meningkatkan *good governance*.

Pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, unjuk kerja atau *performance* yang dilakukan yaitu pengawas telah menjalankan tugasnya sebagai

pengawas untuk meningkatkan daya saing, dan memberikan bukti bahwa koperasi telah mendapatkan manfaat yang nyata dari telah diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di dalam koperasi.

Berdasarkan hasil kuesioner mengenai penilaian yang berkaitan dengan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Penilaian yang berkaitan dengan perwujudan *good governance*.

1. Penerapan prinsip transparansi pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud dengan tingkat persentase 81,7%. Adanya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang melibatkan seluruh pihak koperasi mulai dari pengawas, pengurus, manajer karyawan hingga anggota membuat sistem yang ada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi lebih transparan baik dalam pengelolaan informasi maupun dalam pengambilan keputusan.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud dengan tingkat persentase 87,5%. Dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga membuat job deskripsi dalam Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi jelas dan terarah. Job deskripsi yang disampaikan memiliki kejelasan fungsi dalam pelaksanaannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan agar pengelolaan koperasi terlaksana secara efektif.
3. Penerapan prinsip pertanggungjawaban pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud dengan tingkat persentase 79,2%. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sadar bahwa dengan adanya para karyawan di koperasi maka koperasi dapat berjalan dengan baik, sehingga koperasi sangat bertanggungjawab atas setiap karyawan yang bekerja di Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Bentuk pertanggungjawaban dari Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta yaitu dengan memberikan fasilitas kepada karyawannya agar hidup para karyawan lebih terjamin. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta juga berprinsip memberikan pelayanan untuk lingkungan sekitar dengan menyediakan kebutuhan warga sekitar, membantu daerah yang mengalami musibah, dan membuat program anggaran kegiatan sosial.
4. Penerapan prinsip kemandirian pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta cukup terwujud dengan tingkat persentase 66,7%. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dikelola berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari pengaruh pihak lain.
5. Penerapan prinsip kewajaran pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat terwujud dengan tingkat persentase 85,4%. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta memperlakukan para anggota koperasi dengan baik, setara, dan adil tanpa memandang suku,ras, maupun agama mereka, koperasi juga selalu memenuhi hak-hak para anggota koperasi.

B. Penilaian yang berkaitan dengan peran pengawas Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dalam meningkatkan *Good Governance*.

1. Peran pengawas sebagai kepatuhan (*compliance*) *good governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat berperan dalam meningkatkan *Good Governance* dengan tingkat persentase 79,2%. Pengawas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Pengawas memeriksa setiap jajaran bidang organisasi dan manajemen, pengawas juga

memeriksa setiap Bidang Usaha maupun Bidang Pengembangan Usaha untuk di laporkan pada Rapat Anggota Tahunan dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan koperasi.

2. Peran pengawas sebagai kelengkapan/kesesuaian (*conformance*) *good governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta cukup berperan dalam meningkatkan *Good Governance* dengan tingkat persentase 66,7%. Pengawas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta menjalankan tugasnya sesuai dengan praktik prinsip-prinsip *good governance*, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, AD, dan ART. Selain itu pengawas juga memberikan rekomendasi dan arahan bagaimana agar sistem yang ada dalam koperasi dapat berjalan dengan baik.
3. Peran pengawas sebagai unjuk kerja (*performance*) *good governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta cukup berperan dalam meningkatkan *Good Governance* dengan tingkat persentase 66,7%. Pengawas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta selalu melaporkan hasil pemeriksaannya dalam Laporan Tahunan, tidak hanya melaporkan, pengawas juga memberikan masukan dan arahan kepada pengurus, manajer hingga karyawan agar setiap sistem yang dijalankan bisa menjadi lebih baik lagi. Tujuan dilakukannya pengawasan dan pemberian arahan ini adalah salah satu bukti bahwa pengawas berusaha meningkatkan daya saing koperasi.

Berdasarkan hasil analisis data dari kuesioner dapat terlihat bahwa *Good Governance* yang telah dilaksanakan pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta telah terwujud dengan sangat baik. Keberhasilan pelaksanaan *Good Governance* tidak terlepas dari peran pengawas dalam *Good Governance* yang juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) koperasi. Jika pelaksanaan *Good Governance* ditingkatkan, maka secara otomatis citra koperasi juga semakin baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Jadi, penerapan *Good Governance* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dapat terwujud dengan baik berdasarkan hasil analisa melalui kuesioner pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang didukung data dan informasi terkait dengan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sudah dijalankan dengan baik.

Prinsip *transparency*, Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta berusaha menyediakan informasi bagi karyawan dan anggota secara akurat dan transparan. Informasi yang berasal dari atasan langsung disalurkan ke bawahan begitu juga sebaliknya.

Prinsip *accountability* diwujudkan dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Setiap elemen koperasi mulai dari pengawas, pengurus, manajer hingga karyawan mengerti apa yang menjadi tugas mereka, wewenang yang diberikan, tanggung jawab yang harus dijalankan hingga sanksi yang diberikan apabila mereka melakukan kesalahan. Koperasi sudah melakukan audit baik itu internal maupun eksternal, laporan kegiatan

hasil usaha dan keuangan secara rutin pada akhir tahun dilaksanakan dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Prinsip *responsibility* pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta terhadap masyarakat melalui program anggaran kegiatan sosial. Tanggung jawab Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta terhadap karyawan dijalankan dengan memberikan berbagai tunjangan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta penggajian karyawan sesuai dengan *Surat Keputusan Nomor: Kep/08/Primkop/VI/2013*. Koperasi juga membayar pajak secara rutin.

Prinsip *independency*, Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta merasa tidak ada intervensi dari pihak eksternal maupun internal. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta memperbesar rekanan seperti dengan instansi pemerintah dan juga rekanan perbankan terkait maupun juga dengan lembaga usaha yang lain.

Prinsip *fairness* yang dijalankan di Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sudah baik. Dimana anggota dan karyawan koperasi mendapat perlakuan yang setara.

2. Pencapaian penerapan tata telola yang baik (*good governance*) pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta.

Good Governance pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta, sudah sangat terwujud, begitu juga dengan Pengawas pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta sangat berperan dalam meningkatkan *good governance* koperasi, hal ini disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Dean J. Champion (1990) dan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada.

Keterbatasan yang menjadi kelemahan dari penelitian ini adalah prinsip-prinsip *good governance* yang diteliti dalam koperasi hanya lima prinsip saja, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. penelitian ini hanya melakukan wawancara kepada ketua pengurus, sehingga informasi yang didapatkan belum terlalu menyeluruh. Kuesioner yang disebar hanya kepada para pegawai Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta. Selama penyebaran kuesioner, terdapat sejumlah responden yang dituju tidak mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu terdapat kuesioner yang tidak diisi secara maksimal sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam analisis data.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka diajukan saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian tentang penerapan *good governance* dapat menambahkan prinsip-prinsip *good governance* seperti profesionalisme serta efisiensi dan efektivitas sehingga dapat mengembangkan aspek-aspek tersebut dan mendapatkan informasi secara lebih mendetail. Diharapkan struktur organisasi pada Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta dilengkapi dengan uraian tugas yang jelas serta penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kebutuhan perkembangan koperasi. Primer Koperasi Pegawai UPN “Veteran” Yogyakarta belum menerapkan sistem tanggung renteng maka dari itu sebaiknya segera menerapkan sistem tanggung renteng agar dapat meminimalisir risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam, Ferry Odi. 2012. *Analisis Kesiapan Penerapan Good Corporate Governance Pada Klub Sepakbola di Indonesia (Studi Kasus Pada Klub Sepak Bola Persema Malang)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Andayani, Wuryan. 2001. *Good Corporate Governance sebagai Syarat Perusahaan Publik untuk Mendapatkan Dana*. Lintasan Ekonomi Volume XVIII, Nomor 2, Juli 2001.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Champion, Dean J. 1990. *Basic Statistics for Social research, second edition*. New York: Mac Milan Publishing Co. www.googlebooks.com. Diakses 12 Oktober 2014.
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumaningtyas, Arindri. 2009. *Penerapan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja BUMN (Studi Kasus Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Merza, Gamal. 2006. *Visi Kesejahteraan (Ekonomi nasional)*. Artikel.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Muslimin. 2008. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian.
- Prijambodo. 2012. *Good Governance Cooperative. (Online)*, (<http://www.depkop.go.id>), diakses 10 Oktober 2014.
- Tadikapury, Violetta Jingga. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Mandiri Tbk Kanwil X Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1). Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.